

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM CHSE PADA PELAKU USAHA PARIWISATA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Rina Fitriana¹, Liza Diniarizky Putri²
¹Perhotelan, Politeknik Sahid Jakarta, Indonesia
²Ilmu Komunikasi, Universitas Serang Raya, Indonesia
rinafitriana@polteksahid.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: *CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability)* merupakan salah satu usaha pemerintah melalui Kemendagri untuk menggairahkan kembali pariwisata Indonesia. Dalam memastikan kegiatan wisata yang dilakukan sesuai dengan prinsip kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan, maka diadakan pula sertifikasi CHSE bagi unit usaha pariwisata di seluruh Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dan jajarannya sebagai mitra dalam pengabdian masyarakat kali ini, mengadakan bimbingan teknis pada tanggal 22 Desember 2020 di Hotel Emersia dengan dihadiri sebanyak 32 pelaku usaha pariwisata terkait penerapan dan sertifikasi CHSE di destinasi wisata. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah paparan dan diskusi serta evaluasi. Ditemukan juga bahwa hanya 12 peserta (37,5%) yang pernah mendengar mengenai sertifikasi CHSE sebelum diklat, dan dari 32 peserta, masih terdapat 22% (7 orang) yang menyatakan tidak tertarik mengikuti sertifikasi karena dirasa tidak banyak membantu usahanya. Sebanyak 28 peserta (87,5%) berpendapat bahwa materi hari itu cukup informatif dan dapat dipahami.

Kata Kunci: CHSE; bimbingan teknis; sertifikasi CHSE

Abstract: *CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability)* is one of the government's efforts through the Ministry of Parliamentary Affairs to re-excite Indonesian tourism. In ensuring tourism activities carried out in accordance with the principles of cleanliness, health, security and environmental sustainability, certification is held for tourism businesses throughout Indonesia. The Head of Bandar Lampung Tourism Office and its ranks as partners in community service this time, held a socialization on December 22, 2020 at The Emersia Hotel with 32 tourism businesses attended. The method carried out in this devotion is exposure / lectures and discussions / question and answer. It was also found that only 12 participants (37.5%) who had heard about CHSE certification before training, and of the 32 participants, there were still 22% (7 people) who expressed no interest in joining the certification because it felt that it did not help their business much. A total of 28 participants (87.5%) argue that the material of the day was quite informative and understandable.

Keywords: CHSE; socialization; CHSE certification



Article History:

Received : 29-12-2020
Revised : 19-01-2021
Accepted : 22-01-2021
Online : 21-02-2021



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisata membahas mengenai pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang diarahkan demi kelestarian lingkungan dan budaya serta mengembangkan objek dan daya tarik wisata sehingga mendatangkan pemasukan melalui pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan kepariwisataan daerah bukan hanya dinilai dari ukuran pembangunan fisik akan tetapi juga peranan sumber daya manusianya (Zakiah, 2019).

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia internasional selama 1 (satu) tahun, maka tantangan di bidang pariwisata semakin bertambah berat, baik dari segi sumber daya manusia, manajemen pengelolaan, maupun pemasarannya (Dwina, 2020; Ferdiansyah et al., 2020; Wicaksono, 2020). Hal ini dikarenakan wisatawan saat ini memerlukan hal lain yang lebih dari sekedar destinasi wisata yang elok, sarana prasarana yang menunjang dan pelayanan yang prima. Kebutuhan terbesar wisatawan justru adalah rasa aman dari virus selama menjalani kegiatan wisatanya. Hal ini hanya dapat dipenuhi apabila pelaku usaha pariwisata dapat menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar pemerintah (Kiswanto et al., 2020; Paramita & Putra, 2020; Sulistiyo & Fitriana, 2020).

Menjawab tantangan pasar dan wisatawan yang semakin cerdas dalam memilih destinasi, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif nya mengadakan suatu gerakan bertajuk *Indonesia Care* yang intinya merupakan sebuah program yang mempersiapkan dunia pariwisata Indonesia untuk lebih sadar terhadap aspek CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability*) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan.

Dalam keterangan resminya, Kemenparekraf menyatakan bahwa gerakan ini adalah perwujudan dari antusiasme kolektif orang-orang Indonesia untuk peduli terhadap kebaikan sesama, komitmen untuk sepenuh hati peduli dengan kualitas yang penuh ketelitian dalam menyediakan kebersihan tanpa cela, higienitas, dan pelayanan tanpa kontak langsung untuk keselamatan orang lain.

Dengan adanya penerapan protokol kesehatan (atau CHSE) dalam pariwisata, maka terdapat beberapa pergeseran kebiasaan/cara yang cukup signifikan. Misalkan, di dunia pariwisata, pelayanan prima salah satunya diterapkan melalui 4S yaitu Salam, Senyum, Sapa dan Sentuhan. Dengan adanya pembatasan sosial dan fisik, maka 4S ini perlu diinterpretasi ulang. Pada saat memberi salam kepada wisatawan, misalkan, tidak lagi dilakukan dengan cara bersalaman atau bersentuhan tangan akan tetapi cukup dengan menunjukkan salam sehat, yaitu gerakan memberikan salam dengan cara salam Namaste, mengatupkan kedua telapak tangan di dada. Hal lain yang juga menjadi tantangan adalah jumlah wisatawan yang menurun drastis, yang berimbas langsung terhadap pemasukan usaha pariwisata, namun dengan adanya penerapan protokol kesehatan, biaya operasional semakin bertambah.

Hal ini menyebabkan hampir semua usaha pariwisata yang masih beroperasi pada saat ini tidak mendapatkan keuntungan, melainkan hanya

sekedar bertahan sambil menunggu kondisi membaik dan berangsur normal. Tentu saja perubahan-perubahan ini berimbas pada para pelaku usaha pariwisata yang harus beradaptasi dan tidak jarang mengalami shock karena keadaan yang tiba-tiba saja berubah (Persada & Rusmiati, 2020; Simanjuntak & Fitriana, 2020; Suprihatin, 2020).

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung merupakan wilayah tingkat 2 (dua) terbesar di Provinsi Lampung yang memiliki 49 (empat puluh sembilan) destinasi wisata, baik wisata alam maupun buatan. Habiburrahman dan Primadhini (2018) menyatakan bahwa pembangunan pariwisata Kota Bandar Lampung lebih menitikberatkan kepada pembangunan fisik, bukan kepada sumber daya manusia, yang mana menurutnya hal ini menjadi salah satu catatan bagi kemajuan wisata ke depannya.

Sa'idah (2017) menyatakan bahwa walaupun dari sisi pengelolaan destinasi pariwisata di Kota Bandar Lampung belumlah maksimal, terutama dengan banyaknya destinasi wisata yang masih dikelola oleh perseorangan tanpa melibatkan unsur pentahelix wisata lainnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sector pariwisata tetap menyumbang kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bandar Lampung melalui pemasukan pajak hotel, restoran dan tempat hiburan. Pemasukan yang signifikan ini bias jadi karena pariwisata Bandar Lampung sudah didukung dengan promosi pemasaran pariwisata yang berbasis digital sehingga sudah lebih maju dibanding dengan daerah sekitarnya (Anggara et al., 2018; Herlina et al., 2019). Promosi pariwisata berbasis digital memang telah terbukti sangat ampuh dalam mendatangkan pengunjung/wisatawan (Engriani et al., 2019; Fitriana et al., 2020; Sulistiyo & Fitriana, 2020).

Permasalahan utama dalam kepariwisataan di daerah Kota Bandar Lampung di masa pandemi ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai wisatawan, mengenai penerapan protokol kesehatan. Masih banyak masyarakat yang enggan mengenakan masker, mencuci tangan atau memakai *sanitizer* dan menjaga jarak agar tidak berkerumun (3M). Hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang meresahkan dan mengurangi keamanan setiap orang yang berada di kawasan destinasi wisata.

Dalam rangka mewujudkan wisata sehat yang menerapkan protokol kesehatan 3M selama pandemi Covid-19, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung yang dalam hal ini merupakan mitra dalam pengabdian masyarakat ini, menggelar bimbingan teknis CHSE kepada para pelaku industri pariwisata. Kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari, bertempat di Hotel Emersia dan diikuti oleh total 32 peserta yang terdiri dari pengelola/pemilik hotel, restoran, toko oleh-oleh, pengrajin, pramuwisata dan lain sebagainya yang menjadi target dari pengabdian masyarakat kali ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuat para pelaku usaha di dunia pariwisata tersebut menerapkan protokol kesehatan yang terstandar dalam bidang pariwisata dan mengajak mereka untuk ikut dalam sertifikasi CHSE demi terjaminnya rasa keamanan wisatawan domestik dan mancanegara yang datang ke Kota Bandar Lampung.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 22 Desember 2020, dan indikator keberhasilannya diukur dengan pemahaman dan kesediaan para peserta dalam menerapkan protokol kesehatan 3M di unit usahanya masing-masing. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berlangsung di ruang seminar Emersia Hotel & Resort Lampung, yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No 70, Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dan diikuti oleh 32 pemilik usaha pariwisata yang berasal dari PHRI, ASITA, Pokdarwis, UMKM oleh-oleh dan sebagainya, adalah sebagai berikut:

1. Paparan/Ceramah, dalam sesi ini para pemateri mengemukakan apa itu CHSE dan bagaimana sertifikasi CHSE dilakukan. Terdapat 2 (dua) pembicara dalam sesi ini, yaitu Muchlis, Analis dari Kemenparekraf dan Rina Fitriana, auditor CHSE dari Succofindo cabang Banten selaku pihak ketiga pelaksana sertifikasi CHSE
2. Diskusi/Tanya Jawab, dalam sesi ini peserta dan para narasumber yang dipanelkan bertukar informasi mengenai hal-hal yang dirasa masih mengganjal atau belum jelas dalam pelaksanaan sertifikasi, misalkan bahwa tidak semua usaha pariwisata memiliki TDUP (Tanda Dasar Usaha Pariwisata) yang diterbitkan oleh Kemenparekraf. Sebagian usaha hanya memiliki SIB (Surat Ijin Berusaha) atau jenis perijinan yang levelnya di bawahnya.
3. Evaluasi, yaitu dengan menyebarkan angket melalui google doc, dengan link <https://bit.ly/CHSELampung>, kepada para peserta yang berjumlah 32 orang. Angket tersebut berisi demografi responden dan pertanyaan sebagai berikut:
 - a. Apakah Anda pernah mendengar mengenai CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability*) sebelum diklat ini?
 - b. Apakah Anda tertarik untuk mengikuti sertifikasi CHSE? Mengapa?
 - c. Apakah materi yang diberikan informatif dan implementatif bagi Anda?

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Demografi Peserta

Peserta yang mengikuti pengabdian masyarakat pada hari itu terdiri dari pemilik unit usaha dan tidak dapat diwakilkan kepada pegawai/pengelola. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para pemilik yang menentukan arah kebijakan usaha dapat menerapkannya langsung dalam manajemen. Apabila sosialisasi ini diwakilkan, maka pegawai/pengelola harus menyampaikan lagi kepada pemilik dan belum tentu disetujui karena penerapan 3M ini jelas berkaitan dengan *budget*

operasional. Adapun demografi peserta yakni (1) segi usia: dibawah 20 tahun 3 orang, 20 – 30 tahun 16 orang, 30 – 40 tahun 4 orang, dan diatas 40 tahun 9 orang; (2) jenis usaha pariwisata yang dimiliki yakni hotel/penginapan/homestay 5 peserta, oleh-oleh/Kerajinan/Cinderamata 6 peserta, rumah makan/restoran 2 peserta, tour 11 peserta, dan pokdarwis 8 peserta.

2. Penyampaian Materi

Pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020 dan bertempat di Hotel Emersia, Kota Bandar Lampung, dengan melibatkan 32 (tiga puluh dua) peserta dari kalangan pelaku usaha pariwisata dan 2 (dua) pemateri, yaitu Muchlis dari Kemenparekraf dan Rina Fitriana dari Succofindo yang masing-masing memberikan paparan dan diskusi selama 120 menit. Bertindak sebagai mitra dalam pengabdian kali ini adalah Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung.

Pengabdian ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dimana semua peserta dan pemateri serta panitia yang terlibat diharuskan mengikuti rapid tes sebelum diperbolehkan memasuki ruangan tempat acara berlangsung. Adapun peserta yang diketahui hasilnya reaktif, mereka diberi uang transport dan langsung diminta untuk kembali ke rumahnya masing-masing.

Pemateri pertama yang memberikan materinya adalah pembicara dari Kemenparekraf yang menjelaskan apa itu CHSE, bagaimana CHSE diinterpretasikan ke dalam perilaku wisata yang sesuai dengan nilai-nilai sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan), dan pentingnya CHSE mendapatkan suatu standarisasi secara nasional sehingga menjamin protokol yang dilakukan di satu destinasi akan sama dengan destinasi wisata lainnya.

Pemateri kedua adalah penulis yang tampil sebagai auditor CHSE dari Succofindo dan memaparkan mengenai teknis pelaksanaan audit CHSE bagi pelaku usaha pariwisata. Dari mulai apa yang sebaiknya dipersiapkan, sampai pada bagaimana penerbitan sertifikat dan barcode dari Succofindo dan Kemenparekraf sebagai kelanjutan dari pelaksanaan audit.

Setelah kedua materi disampaikan, ada banyak pertanyaan dan terjadi diskusi yang hangat antara pemateri dengan peserta. Ternyata ditemukan bahwa sebagian besar peserta pelatihan pada hari itu belum pernah mendengar mengenai sertifikasi CHSE dan mempertanyakan kenapa kegiatan tersebut tidak mendapat porsi sosialisasi dan bimbingan teknis yang luas padahal akan sangat membantu para pelaku usaha pariwisata untuk marketing produknya.

Selain mengenai sosialisasi dan bimbingan teknis yang dirasa kurang, peserta banyak bertanya mengenai ijin yang menjadi syarat untuk mengikuti sertifikasi, apakah harus TDUP (Tanda Dasar Usaha

Pariwisata) atau bisa menyertakan perijinan dibawahnya, seperti SIB (Surat Ijin Berusaha). Inti dari diskusi adalah mengenai ketertarikan sebagian besar peserta untuk mengikuti sertifikasi CHSE agar dapat memasarkan produknya dengan lebih baik pada masa adaptasi kebiasaan baru ini.

Dalam sesi ini, pertanyaan lebih banyak dikemukakan oleh mereka yang berasal dari usaha pariwisata lain selain hotel dan restoran. Hotel dan restoran biasanya telah memiliki sertifikasi sendiri sebelumnya (yaitu sertifikasi bintang untuk hotel dan laik makanan untuk restoran) yang mana dimensi-dimensi CHSE ini sudah ada di dalam sertifikasi tersebut. Diskusi ini berjalan dua arah dengan beberapa peserta membagi pengalamannya dalam proses sertifikasi usaha yang pernah mereka jalani. Suasana kegiatan terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian Materi dan Tanya Jawab

3. Evaluasi

Dalam evaluasi, peserta diberikan pertanyaan yang hasil jawabannya adalah:

- a. Ditemukan bahwa hanya 12 peserta (37,5%) yang pernah mendengar mengenai sertifikasi CHSE sebelum diklat. Hal ini menunjukkan kalau masih banyak peserta yang tidak familiar dengan program CHSE yang diadakan oleh Kemenparekraf ini. Mereka menyatakan bahwa asosiasi di daerah mereka juga tidak banyak mensosialisasikan mengenai program ini. Sebagian besar yang mendengar mengenai program ini adalah mereka yang berasal dari usaha hotel dan restoran yang merupakan *franchise*. Hal ini tentu menunjukkan bahwa sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi ini, maka lebih banyak sosialisasi diperlukan. Hendaknya, bukan hanya unit usaha saja yang diundang akan tetapi juga asosiasi usaha pariwisata, misalkan asosiasi homestay desa wisata, supaya dapat membantu mensosialisasikan kepada segenap anggotanya.

- b. Dari 32 peserta, masih terdapat 22% (7 orang) yang menyatakan tidak tertarik mengikuti sertifikasi karena dirasa tidak banyak membantu usahanya. Peserta yang termasuk dalam kategori ini, saat didalami melalui wawancara, adalah mereka yang target pasarnya memang wisatawan dalam negeri (*domestic*) yang tidak terlalu mempermasalahkan mengenai standarisasi protokol kesehatan yang diterapkan. Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, maka sosialisasi mengenai pentingnya penerapan protokol untuk destinasi wisata ternyata diperlukan bukan hanya oleh pelaku usaha saja, akan tetapi juga semua wisatawan agar selama kegiatan wisata yang dilakukan, protokol tersebut diterapkan sehingga mengurangi kemungkinan penyebaran virus Covid-19 dan mencegah terciptanya klaster baru virus ini. Ketidakpedulian wisatawan dalam negeri mengenai pemilihan destinasi dan tempat usaha pariwisata yang sudah tersertifikasi menunjukkan bahwa masih banyak dari mereka yang bersikap abai terhadap pentingnya penerapan protokol 3M ini.
- c. Sebanyak 28 peserta (87,5%) berpendapat bahwa materi hari itu cukup informatif dan dapat dipahami. Sisanya merasa informasi tersebut tidak terlalu dibutuhkan karena tidak akan banyak berpengaruh pada pemasaran produk pariwisata yang mereka miliki.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) temuan dalam Bimbingan Teknis ini yaitu:

- a. Penamaan "audit" yang oleh banyak orang dirasa terlalu menyeramkan sehingga membuat banyak pihak enggan untuk mengikuti karena dikhawatirkan adanya pemeriksaan yang melebar melebihi dimensi CHSE. Beberapa peserta menyarankan agar kata "audit" diganti saja dengan verifikasi yang lebih halus dan mudah diterima.
- b. Keinginan pelaku usaha untuk mengikuti sertifikasi agaknya banyak dipengaruhi oleh stratifikasi pasar dimana usaha mereka berada. Mereka yang membidik pasar internasional (turis Mancanegara) agaknya sangat bersemangat dalam mengikuti, akan tetapi mereka yang bidang bisnisnyamasih bergerak menysasar turis lokal/domestik sepertinya merasa sertifikasi ini tidak akan banyak membawa perbedaan pada pengembangan usaha mereka.
- c. Kebingungan peserta terkait adanya program CHSE yang digaungkan oleh Kemenparekraf. Terdapat pertanyaan seperti, "Lalu baimana dengan program Sapta Pesona dan Sadar Wisata?" dan "Apakah kemudian CHSE menggantika Sapta Pesona dan Sadar Wisata?"

C. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang bisa diambil dalam pengabdian masyarakat kali ini adalah bahwa CHSE masih memerlukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih luas, terutama berkenaan dengan manfaat dari sertifikasi CHSE yang menjadi salah satu program kerja yang diteruskan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru, agar tercipta kegiatan wisata yang menerapkan protokol kesehatan terstandar. Pelaku usaha pariwisata pada dasarnya menyambut baik pelaksanaan program CHSE berikut sertifikasinya. Untuk selanjutnya, isu mengenai CHSE masih harus diberikan dan lebih spesifik lagi ditambahkan dengan program toilet bersih di destinasi, yang merupakan program tambahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru. Adapun di pendampingan yang akan datang, masyarakat diberikan pemahaman sadar wisata dan sapta pesona yang dihubungkan dengan CHSE untuk menyatakan bahwa kehadiran program CHSE merupakan reaksi dari adanya Covid-19 dan tidak sama sekali bertentangan dengan program Sadar Wisata dan Sapta Pesona yang telah lebih dulu ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung beserta jajarannya selaku mitra pengabdian kepada masyarakat kali ini, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Keatif atas hibah pariwisata yang diberikan sehingga memungkinkan terselenggaranya kegiatan ini. Semoga ini menjadi usaha kita bersama dalam menciptakan pariwisata Kota Bandar Lampung yang maju dan berdaya saing. Aamiin ya Robb.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggara, B., Andoyo, A., Kasmi, K., & Ipnuwati, S. (2018). Perancangan Aplikasi E-Tourism Berbasis Android sebagai Strategi Promosi Pariwisata Provinsi Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1(1), 13–18.
- Dwina, I. (2020). *Melemahnya Ekonomi Indonesia Pada Sektor Pariwisata, Akibat Dampak Dari Pandemi Covid-19* (hal. 5). Center for Open Science.
- Engriani, M., Fitriana, R., & Cetty, C. (2019). Pengaruh Promosi Media Sosial Line terhadap Keputusan Pembelian di Starbucks Mall Taman Anggrek. *Ikra-Ith Ekonomika*, 2(3), 140–147.
- Ferdiansyah, H., Suganda, D., Novianti, E., & Khadijah, U. (2020). Pengelolaan Mitigasi Krisis Pariwisata Akibat Pandemi Covid-19 dalam Menghadapi Fase New Normal (Studi Kasus di Desa Wisata Nglanggeran Yogyakarta). *Media Bina Ilmiah*, 15(3), 4133–4144.
- Fitriana, R., Nasution, D., & Amel, A. (2020). Pengaruh Konten Travel Blogger terhadap Kunjungan Wisatawan Domestik Ke Sumbawa. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 1–9.
- Habiburrahman, H., & Primadhini, I. (2018). *Upaya Mengembangkan Pariwisata Kota Bandar Lampung*. Universitas Bandar Lampung.
- Herlina, H., Karnila, S., Kurniawan, R., Yulmaini, Y., & Yusendra, M. (2019). Penggunaan Informasi Jarak Terpendek pada Aplikasi E-Tourism Berbasis

- Android sebagai Strategi Promosi Pariwisata Bandar Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Sains, Matematika, Informatika dan Aplikasinya*, 41–48.
- Kiswanto, A., Rohman, H., & Susanto, D. (2020). Penyaluran Alat Pencegahan dan Sosialisasi Protokoler Kesehatan untuk Pelayanan Kunjungan Wisatawan dalam Menghadapi New Normal Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 1(2), 38–51.
- Paramita, I., & Putra, I. (2020). New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 5(2), 57–65.
- Persada, C., & Rusmiati, F. (2020). *Ketika Pariwisata Terguncang dan harus Beradaptasi Menghadapi Pandemi Covid-19*. Pusaka Media.
- Sa'idah, A. (2017). *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Simanjuntak, D., & Fitriana, R. (2020). Culture Shock, Adaptation, and Self-Concept of Tourism Human Resources in Welcoming the New Normal Era. *Society*, 8(2), 403–418.
- Sulistiyo, T., & Fitriana, R. (2020). Pengaruh Marketing Media Sosial Instagram terhadap Brand Image The Bunker Café, Tangerang. *Jurnal Ekbis*, 2(2), 189–203.
- Suprihatin, W. (2020). Analisis Perilaku Konsumen Wisatawan Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pariwisata di Nusa Tenggara Barat). *BESTARI*, 1(1), 56–66.
- Wicaksono, A. (2020). New Normal Pariwisata Yogyakarta. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 14(3), 139–150.
- Zakiah, F. (2019). *Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Membangun Infrastruktur Kota Bandar Lampung Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2010-2017 (Studi di Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.